



LAPORAN
KEUANGAN
KOMISI YUDISIAL RI
(Audited)

2
0
2
2



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 144/SET/KU.02.02/05/2023 Jakarta, 09 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*)

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jl. Lapangan Banteng No.2 – 4.
Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-54/PB/PB.6/2022 Tanggal 29 Desember 2022 hal jadwal rekonsiliasi, penyesuaian, dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (*Audited*) bersama ini disampaikan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022 (*Audited*).

Adapun Laporan Keuangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022 (*Audited*) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 09 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Grafik	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Pernyataan Telah Direviu	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum dan Peraturan	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	15
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
A.7. Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI	25
A.8. <i>Refocussing</i> kegiatan/realokasi anggaran PC PEN	29
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja	36
B.3. Belanja Pegawai	37
B.4. Belanja Barang	38
B.5. Belanja Modal	39
B.6. Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan	41
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Belanja Dibayar Dimuka	42
C.2. Persediaan	43
C.3. Tanah	45
C.4. Peralatan dan Mesin	47
C.5. Gedung dan Bangunan	57
C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan	59

KETERANGAN	Halaman
C.7. Aset Tetap Lainnya	60
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	62
C.9. Aset Tak Berwujud	62
C.10. Aset Lain-lain	63
C.11. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	64
C.12. Utang Kepada Pihak Ketiga	65
C.13. Pendapatan Diterima Dimuka	66
C.14. Ekuitas	66
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	67
D.2. Beban Pegawai	68
D.3. Beban Persediaan	69
D.4. Beban Barang dan Jasa	70
D.5. Beban Pemeliharaan	72
D.6. Beban Perjalanan Dinas	73
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	74
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	74
D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	76
D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	76
D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76
D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	77
D.13. Surplus / Defisit – LO	77
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	78
E.2. Surplus (Defisit) LO	78
E.3. Transaksi Antar Entitas	78
E.4. Ekuitas Akhir	78
F. Pengungkapan Penting Lainnya	79

DAFTAR TABEL dan GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel	1	Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022	31
Tabel	2	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	31
Tabel	3	Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021	35
Tabel	4	Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022	36
Tabel	5	Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021	37
Tabel	6	Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021	38
Tabel	7	Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021	39
Tabel	8	Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	43
Tabel	9	Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2044	44
Tabel	10	Persediaan menggunakan akun Covid-19	45
Tabel	11	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022	45
Tabel	12	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	62
Tabel	13	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022	64
Tabel	14	Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	68
Tabel	15	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 2021	69
Tabel	16	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021	70
Tabel	17	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021	72
Tabel	18	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 2021	73
Tabel	19	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Per 31 Desember 2022 dan 2021	74
Tabel	20	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 2021	75
Tabel	21	Rincian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2022	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1	Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022	32
Grafik	2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021	36
Grafik	3	Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021	36
Grafik	4	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021	38

Grafik	5	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021	39
Grafik	6	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021	40
Grafik	7	Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	44
Grafik	8	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022	69
Grafik	9	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	69
Grafik	10	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022	71
Grafik	11	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022	73
Grafik	12	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022	74
Grafik	13	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022	76



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755
Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 09 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454, www.komisyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun Anggaran 2022 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 9 Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

R. Adha Pamekas

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp416.291.645,00 dengan estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.033.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.199.066.693,00 atau mencapai 96,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp168.501.904.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp382.505.494.962,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.684.623.661,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp378.672.119.876,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp148.751.425,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp292.847.417,00 dan Rp382.212.647.545,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

31 Desember 2022 adalah sebesar Rp122.140.668,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp155.805.018,053,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp155.682.877.385,00. Kegiatan Non Operasional Defisit sebesar Rp8.660.975,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp155.691.538.360,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp365.346.957.757,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp155.691.538.360,00 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp172.559.178.148,00 serta Kenaikan Ekuitas sebesar Rp16.865.689.788,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp382.212.647.545,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022			31 DESEMBER 2021
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	21.033.000,00	416.291.645,00	1.979,23	285.386.821,00
Jumlah Pendapatan		21.033.000,00	416.291.645,00	1.979,23	285.386.821,00
BELANJA					
1. Belanja Pegawai	B.3	36.889.040.000,00	36.286.807.770,00	98,37	35.092.403.787,00
2. Belanja Barang	B.4	120.851.146.000,00	115.621.736.797,00	95,67	67.632.333.247,00
3. Belanja Modal	B.5	10.761.718.000,00	10.290.522.126,00	95,62	1.035.217.651,00
Jumlah Belanja		168.501.904.000,00	162.199.066.693,00	96,55	103.759.954.685,00

Jakarta, 09 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NAMA AKUN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Jumlah	%
1		2	3	4	5
Aset					
Aset Lancar					
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1	1.090.342.841,00	514.912.050,00	575.430.791,00	111,75
Persediaan	C.2	2.594.280.820,00	2.319.735.591,00	274.545.229,00	11,84
Jumlah Aset Lancar		3.684.623.661,00	2.834.647.641,00	849.976.020,00	29,99
Aset Tetap					
Tanah	C.3	282.466.804.200,00	272.460.683.000,00	10.006.121.200,00	3,67
Peralatan dan Mesin	C.4	53.380.316.589,00	50.442.519.447,00	2.937.797.142,00	5,82
Gedung dan Bangunan	C.5	99.251.188.984,00	95.414.717.599,00	3.836.471.385,00	4,02
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.6	3.588.869.628,00	3.588.869.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.7	2.429.696.615,00	2.466.563.964,00	(36.867.349,00)	(1,49)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8	0,00	216.234.730,00	(216.234.730,00)	(100,00)
Akumulasi Penyusutan	C.9	(62.444.756.140,00)	(62.069.176.547,00)	(375.579.593,00)	0,61
Jumlah Aset Tetap		378.672.119.876,00	362.520.411.821,00	16.151.708.055,00	4,46
Aset Lainnya					
Aset Tak Berwujud	C.10	2.165.701.060,00	2.655.488.940,00	(489.787.880,00)	(18,44)
Aset Lain-lain	C.11	583.638.380,00	1.200.705.558,00	(617.067.178,00)	(51,39)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(2.600.588.015,00)	(3.579.717.204,00)	979.129.189,00	(27,35)
Jumlah Aset Lainnya		148.751.425,00	276.477.294,00	(127.725.869,00)	(46,20)
Jumlah Aset Kewajiban		382.505.494.962,00	365.631.536.756,00	16.873.958.206,00	4,62

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

NAMA AKUN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Jumlah	%
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	271.727.085,00	178.278.499,00	93.448.586,00	52,42
Pendapatan di terima di muka	C.14	21.120.332,00	106.300.500,00	(85.180.168,00)	(80,13)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		292.847.417,00	284.578.999,00	8.268.418,00	2,91
Jumlah Kewajiban Ekuitas		292.847.417,00	284.578.999,00	8.268.418,00	2,91
Ekuitas	C.15	382.212.647.545,00	365.346.957.757,00	16.865.689.788,00	4,62
Jumlah Ekuitas		382.212.647.545,00	365.346.957.757,00	16.865.689.788,00	4,62
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		382.505.494.962,00	365.631.536.756,00	16.873.958.206,00	4,62

Jakarta, 09 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	JUMLAH	%
1		2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	122.140.668,00	110.098.167,00	12.042.501,00	10,94
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		122.140.668,00	110.098.167,00	12.042.501,00	10,94
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	36.348.917.020,00	35.089.813.637,00	1.259.103.383,00	3,59
Beban Persediaan	D.3	1.725.042.288,00	1.446.372.949,00	278.669.339,00	19,27
Beban Barang dan Jasa	D.4	58.063.593.261,00	35.011.908.612,00	23.051.684.649,00	65,84
Beban Pemeliharaan	D.5	8.335.378.617,00	8.407.707.649,00	(72.329.032,00)	(0,86)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	44.515.612.580,00	20.413.372.974,00	24.102.239.606,00	118,07
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.744.312.200,00	776.620.000,00	967.692.200,00	124,60
Beban Penyusutan & Amortisasi	D.8	5.072.162.087,00	5.216.135.389,00	(143.973.302,00)	(2,76)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		155.805.018.053,00	106.361.931.210,00	49.443.086.843,00	46,49
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(155.682.877.385,00)	(106.251.833.043,00)	(49.431.044.342,00)	46,52
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	304.826.806,00	0,00	304.826.806,00	~
Beban Pelepasan Aset	D.10	385.009.106,00	1.761.000,00	383.248.106,00	21.763,10

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	JUMLAH	%
1		2	3	4	5
Non Lancar					
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(80.182.300,00)	(1.761.000,00)	(78.421.300,00)	4.453,23
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	74.504.339,00	98.066.421,00	(23.562.082,00)	(24,03)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	2.983.014,00	15.239.000,00	(12.255.986,00)	(80,43)
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		71.521.325,00	82.827.421,00	(11.306.096,00)	(13,65)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.660.975,00)	81.066.421,00	(89.727.396,00)	(110,68)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	D.13	(155.691.538.360,00)	(106.170.766.622,00)	(49.520.771.73800)	46,64

Jakarta, 09 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	JUMLAH	%
1		2	3	4	5
EKUITAS AWAL	E.1	365.346.957.757,00	367.941.547.845,00	(2.594.590.088,00)	(0,71)
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(155.691.538.360,00)	(106.170.766.622,00)	(49.520.771.738,00)	46,64
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas					
Koreksi Nilai Persediaan		(1.950.000,00)	101.608.670,00	(103.558.670,00)	(101,92)
Koreksi Atas Reklasifikasi		0,00	11.476.500,00	(11.476.500,00)	(100,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap		(1.950.000,00)	0,00	(1.950.000,00)	100,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain		0,00	90.132.170,00	(90.132.170,00)	(100,00)
Koreksi Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	172.559.178.148,00	103.474.567.864,00	69.084.610.284,00	66,76
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		16.865.689.788,00	(2.594.590.088,00)	19.460.279.879,00	(750,03)
EKUITAS AKHIR	E.4	382.212.647.545,00	365.346.957.757,00	16.865.689.788,00	4,62

Jakarta, 09 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum
dan Peraturan

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
22. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
23. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 311/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
24. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah "***terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional***".

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan Calon Hakim dan Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.
- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.

- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut:

Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI



Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah pembentukan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan kelompok orang, atau badan hokum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (depalan) kantor penghubung antara lain:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Komisi Yudisial sudah menggunakan sistem pencatatan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
dalam
Penanganan
Pandemi
Covid-19*

(10) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan;
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
3. Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
4. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
 5. Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

*Capaian
Output
Strategis*

A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1.	3866.BIB.001	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/ Banding/Mahkamah Agung	78.400.000,00	78.400.000,00	100%	16 Laporan	16 Laporan	100%
2.	3866.BIB.S01	Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	967.220.000,00	960.146.441,00	99,27%	12 Laporan	12 Laporan	99,27%
3.	3866.BIB.S02	Penyusunan laporan dan evaluasi hasil rekam jejak dan CHA	3.637.919.000,00	3.619.562.243,00	99,5%	70 Orang	70 Orang	99,5%
4.	3866.BIB.S03	Investigasi Pendalaman Kasus	328.708.000,00	320.186.938,00	97,41%	2 Orang	2 Orang	97,41%
5.	3866.BIC.S01	Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	327.800.000,00	285.155.338,00	86,99%	1 Laporan	1 Laporan	86,99%
6.	3866.QIB.001	Pengutan dan integrasi Database Rekam Jejak Hakim	2.500.000.000,00	2.221.530.331,00	88,86%	735 Orang	735 Orang	88,86%
7.	3871.AEA.001	Kegiatan Konsolidasi KY-MA	292.308.000,00	282.219.582,00	96,55%	15 Kegiatan	15 Kegiatan	96,55%
8.	3871.AEA.002	Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi berdasarkan laporan Masyarakat	244.048.000,00	239.465.970,00	98,12%	8 Kegiatan	9 Kegiatan	98,12%
9.	3871.AEA.003	Laporan dan evaluasi kinerja Biro Waskim	577.255.000,00	569.194.964,00	98,61%	16 Kegiatan	16 Kegiatan	98,61%
10.	3871.BIB.001	Laporan hasil penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1.881.696.000,00	1.771.871.786,00	94,16%	1.200 Laporan	1.200 Laporan	94,16%
11.	3871.BIB.002	Pemetaan data integritas dan profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat	133.560.000,00	133.393.286,00	99,88%	450 Orang	450 Orang	99,88%
12.	3871.BIB.003	Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	3.895.181.000,00	3.860.516.602,00	99,11%	150 Laporan	150 Laporan	99,11%
13.	3871.BKC.001	Laporan Hasil Pemantauan Persidangan	1.998.390.000,00	1.858.740.612,00	93,01%	95 Laporan	103 Laporan	93,01%
14.	3872.ADG.001	Pengembang sistem dan metode seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc di Mahkamah Agung	5.600.000,00	5.600.000,00	100%	1 Orang	1 Orang	100%
15.	3872.ADG.002	Talent Pool Calon Hakim Agung	3.960.000,00	2.508.000,00	63,33%	100 Orang	100 Orang	100%

Catatan:* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

16.	3872.ADG.003	Laporan hasil Seleksi Administrasi	94.520.000,00	92.829.485,00	98,21%	1 Orang	2 Orang	98,21%
17.	3872.ADG.S04	Standarisasi Calon Hakim Agung/ Ad Hoc di MA	6.084.541.000,00	5.992.011.033,00	98,48%	108 Orang	108 Orang	98,48%
18.	3872.AEA.001	Laporan dan evaluasi kinerja Biro BRAP	154.466.000,00	146.550.566,00	94,88%	15 Kegiatan	15 Kegiatan	94,88%
19.	3872.PDG.001	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	7.800.000.000,00	6.607.087.569,00	84,17%	600 Persentase	600 Persentase	84,17%
20.	3872.PEA.001	Advokasi Hakim dan Klinik Etik	3.000.000.000,00	2.984.832.549,00	99,49%	28 Laporan	31 Laporan	99,49%
21.	3867.EBA.956	Layanan BMN	616.201.000,00	613.272.063,00	99,52%	19 Dokumen	19 Dokumen	99,52%
22.	3867.EBA.959	Layanan Protokoler	744.615.000,00	739.524.888,00	99,32%	13 Laporan	13 Laporan	99,32%
23.	3867.EBA.962	Layanan Umum	666.680.000,00	624.776.844,00	93,71%	35 Laporan	35 Laporan	93,71%
24.	3867.EBA.994	Layanan Perkantoran	86.574.737.000,00	84.224.975.863,00	97,29%	1 Layanan	1 Layanan	97,29%
25.	3867.EBB.951	Layanan Sarana Internal	7.320.518.000,00	7.104.480.771,00	97,05%	823 Unit	823 Unit	97,05%
26.	3867.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.889.000.000,00	2.644.141.355,00	91,21%	6 Unit	6 Unit	91,21%
27.	3867.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	695.868.000,00	643.756.291,00	92,51%	234 Orang	702 Orang	92,51%
28.	3867.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	3.801076.000,00	3.501.574.515,00	92,12%	234 Orang	486 Orang	92,12%
29.	3867.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.291.807.000,00	4.219.672.865,00	98,32%	25 Dokumen	25 Dokumen	98,32%
30.	3867.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.415.124.000,00	1.375.827.874,00	97,22%	13 Dokumen	13 Dokumen	97,22%
31.	3867.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	219.852.000,00	216.707.083,00	98,57%	7 Dokumen	7 Dokumen	98,57%
32.	3867.FAI.002	Monitoring tindak lanjut kerjasama dan hubungan antar lembaga	900.012.000,00	894.874.711,00	99,43%	11 Lembaga	11 Lembaga	99,43%
34.	3868.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	6.047.430.000,00	5.570.338.651,00	92,11%	1 Layanan	1 Layanan	92,11%
35.	3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.033.700.000,00	3.938.353.845,00	97,64%	1 Layanan	1 Layanan	97,64%
36.	3868.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	180.000.000,00	166.411.583,00	92,45%	15 Dokumen	15 Dokumen	92,45%
37.	3868.FAI.001	Dokumen hasil kajian Kelembagaan	328.209.000,00	325.760.574,00	99,25%	2 Lembaga	2 Lembaga	99,25%

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



38.	3868.FAI.002	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	437.399.000,00	432.579.073,00	98,9%	15 Lembaga	15 Lembaga	98,9%
39.	3868.FAI.003	Analisis Putusan	608.182.000,00	604.313.427,00	99,36%	3 Lembaga	3 Lembaga	99,36%
40.	5267.EBA.957	Layanan Hukum	912.841.000,00	893.594.018,00	97,89%	78 Dokumen	184 Dokumen	97,89%
41.	5267.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata kelola	820.202.000,00	793.125.421,00		6 Dokumen	7 Dokumen	96,7%
42.	5267.EBD.952	Dokumen Pengelolaan dan Pengadministrasian Sistem Perencanaan dan Anggaran	2.686.735.000,00	2.663.818.38700	99,15%	33 Dokumen	35 Dokumen	99,15%
43.	5267.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.138.074.000,00	1.115.474.068,00	98,01%	30 Dokumen	30 Dokumen	98,01%
44.	5267.EBD.965	Layanan Audit Internal	1.158.100.000,00	1.146.595.552,00	99,01%	22 Dokumen	33 Dokumen	99,01%
45.	5267.TBD.003	Dokumen Produk Hukum lainnya	6.000.000.000,00	5.955.315.89900	99,26%	7.36 Dokumen	8 Dokumen	99,26%

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Refocussing
kegiatan/
realokasi
anggaran PC
PEN

A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN

Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk PC PEN:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Alokasi Belanja (Rp)	Presentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Refocussing
kegiatan/
realokasi
anggaran pada
Komisi Yudisial
R.I

A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial R.I

Periode Tahun Anggaran 2022, Komisi Yudisial telah melakukan *refocusing* kegiatan/realokasi anggaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022 tentang penyesuaian belanja pegawai yang berasal dari Blokir *automatic adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Yudisial melakukan penyesuaian/pemotongan belanja pegawai sebesar Rp.3.903.053.000,00
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 tentang realokasi anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang terblokir ke bagian anggaran bendahara Umum Negara. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Yudisial realokasi blokir anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp.12.020.660.000,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Yudisial RI telah melakukan *automatic adjustment* belanja TA 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pembukaan blokir yaitu sebagai berikut:

1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Yudisial melakukan blokir anggaran sebesar 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.9.221.281.000,00
2. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-458/MK.02/2022 tanggal 23 mei 2022 tentang penambahan *automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Berdasarkan surat tersebut, maka Komisi Yudisial melakukan penambahan *automatic adjustment* belanja TA 2022 sebesar Rp.8.635.739.000,00
3. Komisi Yudisial mengajukan surat usulan revisi anggaran nomor: 77/SET/PR.03.03/09/2022 tanggal 28 September 2022, kemudian berdasarkan surat tersebut Kementerian Keuangan memberikan surat persetujuan kementerian keuangan nomor: ND-2/AG/AG.4/2022 tanggal 05 oktober 2022 tentang pengesahaan revisi buka blokir *automatic adjustment* anggaran Komisi Yudisial RI TA 2022 sebesar Rp.1.933.307.000,00 yang digunakan untuk kebutuhan biaya seleksi calon hakim agung/*ad hoc* dan penelusuran rekam jejak calon hakim agung/*ad hoc*

Komisi Yudisial RI telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal, Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan dimana PAGU awal sebesar **Rp184.425.617.000,00** setelah revisi terakhir menjadi sebesar **Rp168.501.904.000,00** Perubahan tersebut merubah total PAGU pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berdasarkan jenis belanja antara lain:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tabel 1
Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2022

Uraian	2022	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	21.033.000,00	21.033.000,00
Jumlah Pendapatan	21.033.000,00	21.033.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	43.676.357.000,00	36.889.040.000,00
Belanja Barang	120.242.742.000,00	120.851.146.000,00
Belanja Modal	20.506.518.000,00	10.761.718.000,00
Jumlah Belanja	184.425.617.000,00	168.501.904.000,00

Realisasi Pendapatan
Rp416.291.645,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp416.291.645,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan dari Penjualan BMN dan Pendapatan Denda. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

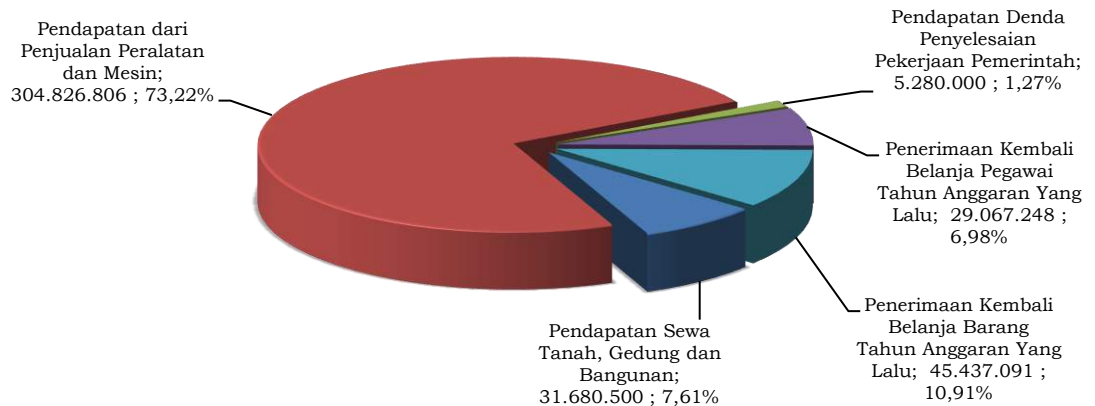
Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.033.000,00	31.680.500,00	150,62
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	304.826.806,00	~
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	5.280.000,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	29.067.248,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	45.437.091,00	~
Jumlah	21.033.000,00	416.291.645,00	1.979,23

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022



Realisasi pendapatan per 31 Desember 2022 dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp31.680.500,00. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan untuk Kantin Komisi Yudisial Perjanjian Nomor: PERJ-01/BU.KY/09/2022 tanggal 26 September 2022, dengan periode sewa 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.680.500,00, NTPN Nomor:F444B55DENCJFV5V tanggal 05 Desember 2022.
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp304.826.806,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-113/26/2022 tanggal 23 Februari 2022, NTPN Nomor: 355352G4V6QLGRLU tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp41.000.999,00.
 - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor RL-141/26/2022 tanggal 10 Maret 2022, NTPN Nomor: 3DACC6U8EBMV4USB tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp263.825.807,00.
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp5.280.000,00 berupa Pembayaran Belanja Modal Tahap-3 sesuai Kontrak No.708/PERJ/PPK-1.KY/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, Addendum Kontrak No.006/Addendum.Perj/PPK-1.KY/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022, BAPP No.1289/BAPP/PPK-1.KY/11/2022 Tanggal 24 November 2022, SP2D 221331301051112 tanggal 07 Desember 2022.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp29.067.248,00 berupa:
- a. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Oktober 2021 s.d. Januari Tahun 2022 untuk 6 pegawai / 14 jiwa Nomor SP2D 221331301020587 tanggal 27 September 2022 sebesar Rp232,00.
 - b. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. NA Periode Bulan November 2019 s.d. September Tahun 2021 untuk 1 pegawai / 1 jiwa Nomor SP2D 221331301021231 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp144,00.
 - c. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. NA Periode Bulan Desember 2017 s.d. Desember Tahun 2018 untuk 1 pegawai / 1 jiwa SP2D 221331301021234 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp540,00.
 - d. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. NA Periode Bulan Januari s.d. Oktober Tahun 2019 untuk 1 pegawai / 1 jiwa SP2D 221331301021233 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp340,00.
 - e. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. TA Periode Bulan Januari 2021 s.d. September Tahun 2022 untuk 1 pegawai / 3 jiwa SP2D 221331301040723 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp6.480.000,00.
 - f. Pembayaran THR Tahun 2021 dan 2022 Untuk 1 Pegawai SP2D 221331301040724 tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp540.000,00
 - g. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. AWW Periode Bulan Januari 2021 s.d. September Tahun 2022 untuk 1 pegawai / 4 jiwa SP2D 221331301045651 Tanggal 14 November 2022 sebesar Rp4.320.500,00.
 - h. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. MNA Periode Bulan Januari 2021 s.d. September Tahun 2022 untuk 1 pegawai / 2 jiwa SP2D 221331305000158 Tanggal 14 November 2022 sebesar Rp5.585.050,00.
 - i. Pembayaran THR Tahun 2021 dan 2022 Untuk 1 Pegawai SP2D 221331305000159 Tanggal 14 November 2022 sebesar

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Rp540.000,00.
- j. Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2021 dan 2022 Untuk 2 Pegawai SP2D 221331301045652 Tanggal 14 November 2022 sebesar Rp540.000,00.
 - k. Pembayaran THR Tahun 2021 dan 2022 Untuk 2 Pegawai SP2D 221331301045653 Tanggal 14 November 2022 sebesar Rp1.080.000,00.
 - l. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji a.n. PYA Periode Bulan Januari 2021 s.d. September Tahun 2022 untuk 1 pegawai / 3 jiwa SP2D 221331301047349 tanggal 22 November 2022 sebesar Rp6.480.000,00.
 - m. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Oktober 2021 s.d. Januari Tahun 2022 untuk 4 pegawai / 10 jiwa SP2D 221331301050454 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp60,00
 - n. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Agustus 2021 s.d. Oktober Tahun 2022 untuk 9 pegawai / 25 jiwa SP2D 221331301050456 06 Desember 2022 sebesar Rp2.960.140,00
 - o. Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Periode Bulan Maret 2021 s.d. November Tahun 2022 untuk 8 pegawai / 24 jiwa SP2D 221331305001202 19 Desember 2022 sebesar Rp540.242,00.
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp45.437.091,00 berupa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI Tahun Anggaran 2021 senilai Rp45.437.091,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor:800431JNFCBDTFQT Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp12.600.000,00 TLHP BPK RI PT CII.
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: ED3010N9VHP4O1BC Tanggal 12 April 2022 sebesar Rp8.215.241,00 TLHP BPK RI kelebihan pembayaran MB PT STS.
 - c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Nomor:3EF3048VUS2MBJR0 Tanggal 14 April 2022 sebesar Rp4.573.300,00 TLHP BPK RI kekurangan volume gordyn auditorium.
- d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor:847DA55DEML20LLP Tanggal 14 April 2022 sebesar Rp7.513.550,00 TLHP BPK RI perbaikan dan perapihan area parkir.
- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor:3269B6U8EBPRJ64D Tanggal 19 April 2022 sebesar Rp8.640.000,00 TLHP BPK RI *laveling* lantai *chiler*.
- f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor:33E8148VUSBL4DR1 Tanggal 17 Juli 2022 sebesar Rp22.500,00 TLHP BPK RI pajak *Fullboard*.
- g. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit BPK RI sesuai NTPN Nomor: FF8E38N3E1MURFUH Tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp3.872.500,00 TLHP BPK RI pajak *Fullboard*

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 45,87 persen. Kenaikan pendapatan sebagian besar bersumber dari Penjualan Peralatan dan Mesin.

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021

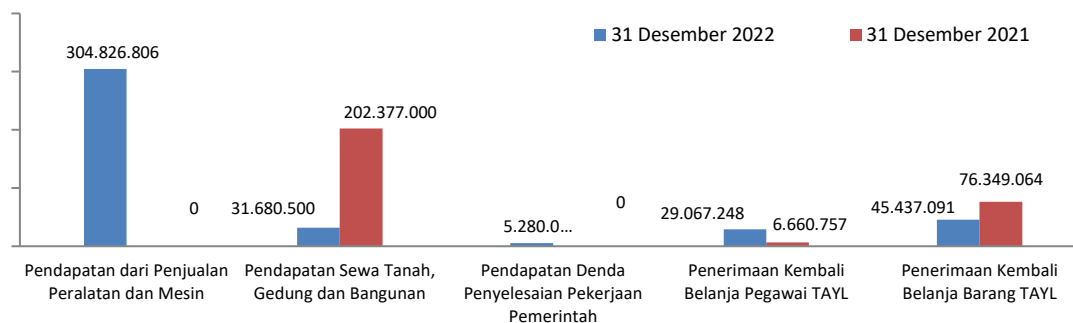
Uraian Akun	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	304.826.806,00	0,00	~
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	31.680.500,00	202.377.000,00	(84,35)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5.280.000,00	0,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	29.067.248,00	6.660.757,00	336,40
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	45.437.091,00	76.349.064,00	(40,49)
Jumlah	416.291.645,00	285.386.821,00	45,87

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 2021



Realisasi Belanja

Negara

Rp162.199.066.693,00

B.2. Belanja

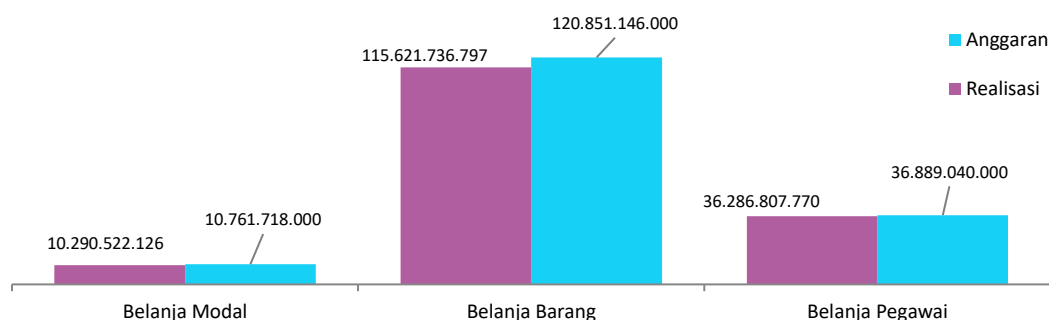
Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.199.066.693,00 atau 96,26% dari anggaran belanja sebesar Rp168.501.904.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	36.889.040.000,00	36.319.325.081,00	98,46
Belanja Barang	120.851.146.000,00	115.831.221.709,00	95,85
Belanja Modal	10.761.718.000,00	10.290.522.126,00	95,62
Total Belanja Kotor	168.501.904.000,00	162.441.068.916,00	96,40
Pengembalian Belanja	0,00	(242.002.223,00)	~
Jumlah	168.501.904.000,00	162.199.066.693,00	96,26

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2022



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Belanja Pegawai
Rp36.286.807.770,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp36.286.807.770,00 dan Rp35.092.403.787,00. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.194.403.983,00 atau 3,40 persen dari 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan para pegawai Komisi Yudisial RI yang semula sebagai Pelaksana/Fungsional Umum sebagian besar telah menjadi Fungsional Tertentu.

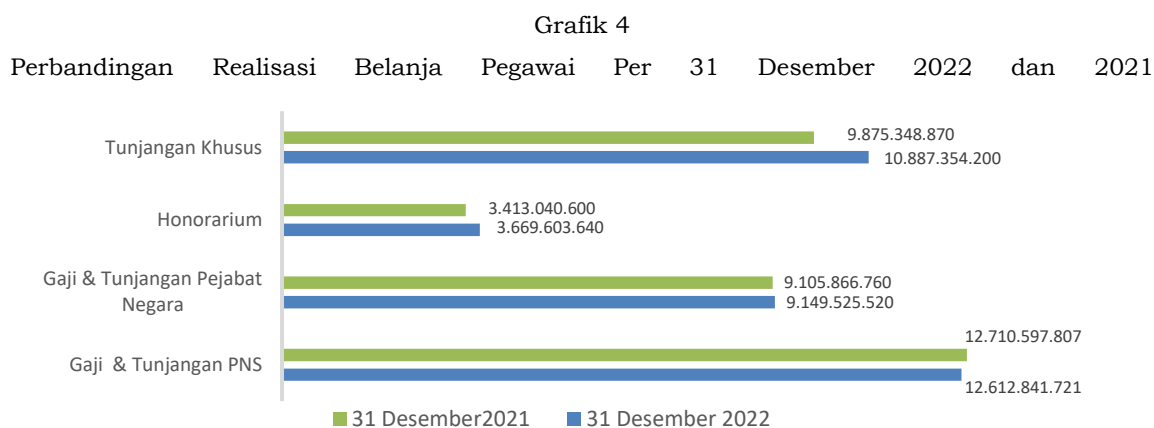
Tabel 5
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi	Realisasi	Naik
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	8.979.030.370,00	8.898.410.520,00	0,91
Belanja Pembulatan Gaji PNS	155.357,00	157.889,00	(1,60)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	572.831.580,00	550.252.460,00	4,10
Belanja Tunj. Anak PNS	158.383.668,00	146.035.288,00	8,46
Belanja Tunj. Struktural PNS	624.060.000,00	619.520.000,00	0,73
Belanja Tunj. Fungsional PNS	495.586.000,00	261.980.000,00	89,17
Belanja Tunj. PPh PNS	38.337.326,00	28.140.050,00	36,24
Belanja Tunj. Beras PNS	488.907.420,00	483.765.600,00	1,06
Belanja Uang Makan PNS	949.965.000,00	1.370.591.000,00	(30,69)
Belanja Tunjangan Umum PNS	305.585.000,00	351.745.000,00	(13,12)
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	429.240.000,00	427.980.000,00	0,29
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	6.320,00	5.860,00	7,85
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	25.284.000,00	25.158.000,00	0,50
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	5.174.400,00	5.140.800,00	0,65
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	6.464.136.000,00	6.435.278.000,00	0,45
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.211.562.900,00	2.198.182.200,00	0,61
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	14.121.900,00	14.121.900,00	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	3.669.603.640,00	3.413.040.600,00	7,52
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	10.887.354.200,00	9.875.348.870,00	10,25
Jumlah Belanja Bruto	36.319.325.081,00	35.104.854.037,00	3,46
Pengembalian Belanja Pegawai	(32.517.311,00)	(12.450.250,00)	161,18
Jumlah Belanja Netto	36.286.807.770,00	35.092.403.787,00	3,40

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Belanja Barang

Rp115.621.736.797,0

0

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp115.621.736.797,00 dan Rp67.632.333.247,00 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp47.989.403.550,00 atau 70,96 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami kenaikan dikarenakan Komisi Yudisial sudah secara penuh menjalankan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi Calon Hakim Agung, melaksanakan seleksi Calon Penghubung Komisi Yudisial di 8 (delapan) wilayah antara lain Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Denpasar, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, melaksanakan Survei Integritas Hakim dan melakukan Pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Barang Operasional	26.072.783.608,00	19.512.094.208,00	33,62
Belanja Barang Non Operasional	9.696.173.059,00	4.924.633.321,00	96,89
Belanja Barang Persediaan	3.687.572.615,00	3.197.864.748,00	15,31
Belanja Jasa	22.750.604.006,00	10.762.650.863,00	111,38
Belanja Pemeliharaan	8.899.118.638,00	8.807.286.320,00	1,04
Belanja Perjalanan Dinas DN	44.087.366.372,00	20.618.717.901,00	113,82

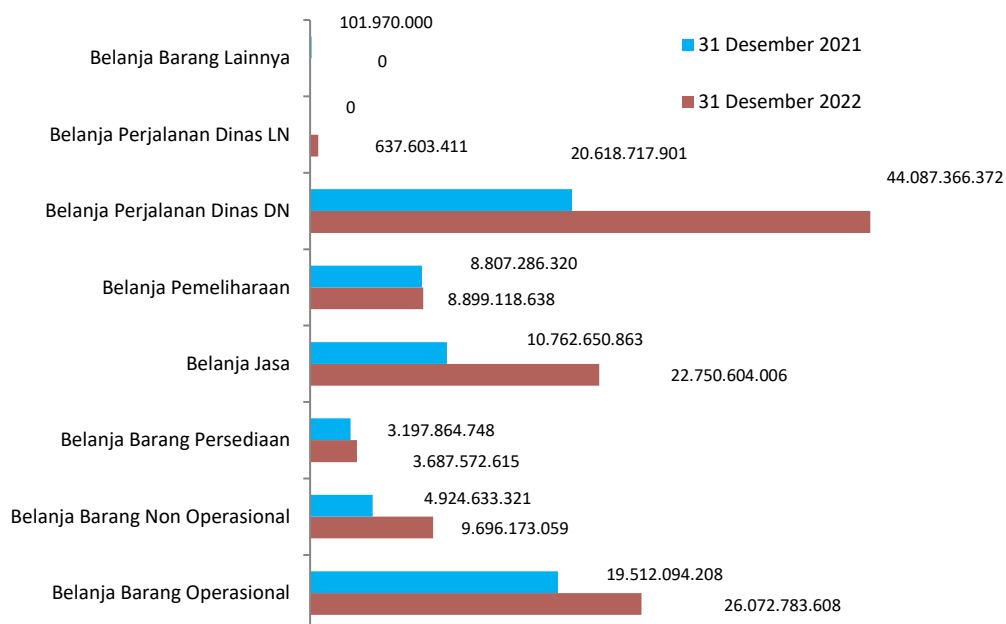
Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Belanja Perjalanan Dinas LN	637.603.411,00	0,00	~
Belanja Barang Lainnya	0,00	101.970.000,00	(100,00)
Realisasi Belanja Barang Bruto	115.831.221.709,00	67.925.217.361,00	70,53
Pengembalian Belanja	(209.484.912,00)	(292.884.114,00)	(28,48)
Realisasi Belanja Barang Netto	115.621.736.797,00	67.632.333.247,00	70,96

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2022 dan 2021



Belanja Modal
Rp10.290.522.126,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.290.522.126,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.255.304.475,00 atau 894,04 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.035.217.651,00. Kenaikan belanja modal terjadi karena pengadaan barang inventaris berupa Komputer Unit dan Peralatan Komputer.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	197.825.000,00	0,00	~

Catatan:

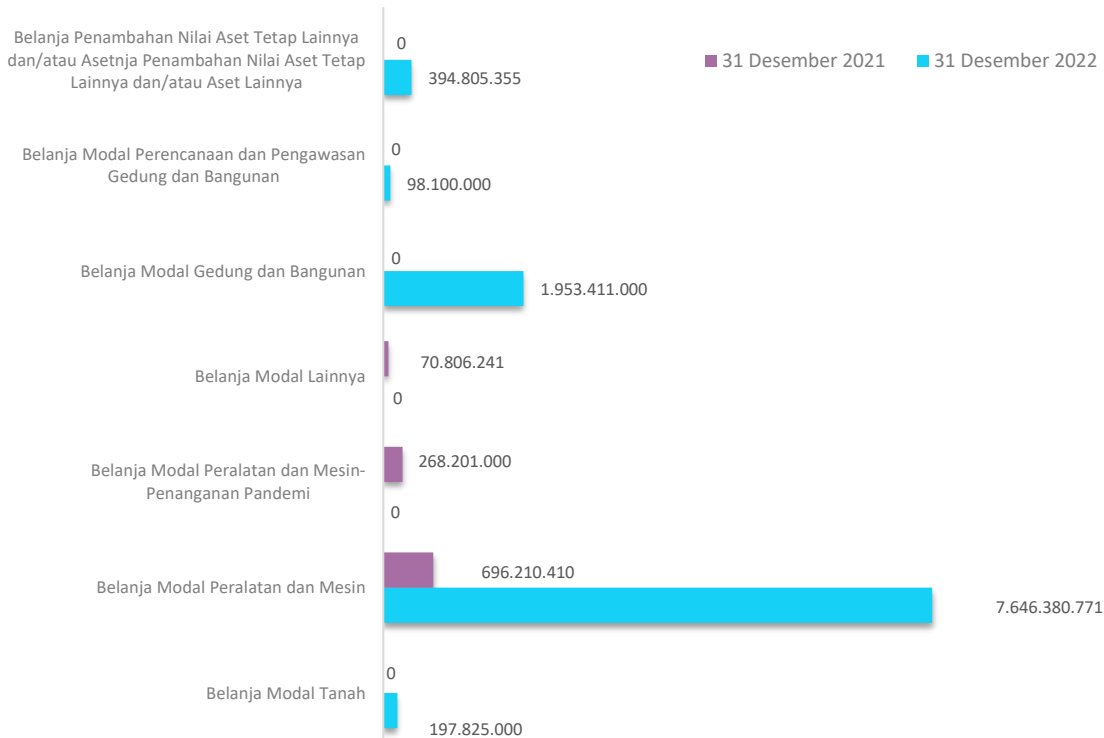
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.646.380.771,00	696.210.410,00	998,29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi	0,00	268.201.000,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0,00	70.806.241,00	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.953.411.000,00	0,00	~
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	98.100.000,00		~
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	394.805.355,00		~
Jumlah Belanja Bruto	10.290.522.126,00	1.035.217.651,00	894,04
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	~
Jumlah Belanja Netto	10.290.522.126,00	1.035.217.651,00	894,04

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2022 dan 2021

**Catatan:**

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

B6. Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan

B.6 Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Komisi Yudisial RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut: PN VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pagu Anggaran PN VII adalah Rp19.300.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp17.768.766.348,00 dimana penyerapannya sebesar 92,07 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut:

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Program Penegakan Integritas Hakim/Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2.500.000.000	2.221.530.331	88,86	Orang	735	735	88,86
2	Program Penegakan Integritas Hakim/Standarisasi Profesi dan SDM	7.800.000.000	6.607.087.569	84,71	Persentase	600	600	84,71
3	Program Penegakan Integritas Hakim/Koordinasi	3.000.000.000	2.984.832.549	99,49	Laporan	28	31	99,49
4	Program Dukungan Manajemen/ Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.000.000.000	5.955.315.899	99,26	Dokumen	7,36	8	99,26
JUMLAH		19.300.000.000	17.768.766.348					

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar

Dimuka

Rp1.090.342.841,00

C.1 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.090.342.841,00 dan Rp514.912.050,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

- a). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp92.500.125,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau TA. 2022. Periode sewa 01 Oktober 2022 s.d. 01 Oktober 2023 sebesar Rp123.333.500,00
- b). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp138.750.750,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat TA. 2022. Periode sewa 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2023 sebesar Rp185.001.000,00
- c). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp134.125.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Lampung Provinsi Bandar Lampung TA. 2022. Periode sewa 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2023 sebesar Rp178.834.000,00
- d). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp111.000.075,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Denpasar Provinsi Bali TA. 2022. Periode sewa 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2023 sebesar Rp148.000.100,00
- e). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp134.125.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Jayapura Provinsi Papua TA. 2022. Periode sewa 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2023 sebesar Rp178.834.000,00
- f). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp78.625.500,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2022. Periode sewa 19 Oktober 2022 s.d. 19 Oktober 2023 sebesar Rp104.834.000,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- g). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp106.500.000,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2022. Periode sewa 20 Oktober 2022 s.d. 20 Oktober 2023 sebesar Rp142.000.000,00
- h). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp107.403.083,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku TA. 2022. Periode sewa 12 Desember 2022 s.d. 11 Desember 2023 sebesar Rp117.167.000,00
- i). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp91.214.475,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat TA. 2022. Periode sewa 14 Desember 2022 s.d. 13 Desember 2023 sebesar Rp99.506.700,00
- j). Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp96.097.833,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2022. Periode sewa 14 Desember 2022 s.d. 13 Desember 2023 sebesar Rp104.834.000,00

Persediaan

Rp2.594.280.820,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.594.280.820,00 dan Rp2.319.735.591,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No	Jenis	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	1.480.991.862,00	743.509.455,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	124.187.800,00	69.238.284,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

3	Suku Cadang	132.032.000,00	122.775.000,00
4	Bahan Baku	14.013.500,00	21.279.250,00
5	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	541.530.300,00	827.165.000,00
6	Persediaan Lainnya	301.525.358,00	535.768.602,00
Jumlah		2.594.280.820,00	2.319.735.591,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat koreksi nilai persediaan sebesar Rp6.527.817,00.

Tabel 9
Rekapitulasi Persediaan Usang Tahun Anggaran 2022

No	Jenis	Unit	Jumlah
1	Kertas Fax	133	1.148.455,00
2	Tinta Laserjet 6001 Cyan	6	4.989.600,00
3	Tinta Laserjet 6001 Yellow	3	2.494.800,00
4	Tinta Laserjet 6001 Magenta	4	3.326.400,00
5	Karbon Fax Fa93A Kx-Fa57E	20	605.000,00
6	Tinta Mesin Fax Panasonic KF-FAT92	8	2.879.800,00
Jumlah			15.444.055,00

Grafik 7

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021



Persediaan menggunakan akun Covid-19 berupa persediaan lainnya dengan rincian persediaan masuk sebesar Rp139.440.000,00, persediaan keluar sebesar Rp25.637.250,00 saldo per 31 Desember 2022 adalah Rp113.802.750,00.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Tabel 10
Persediaan menggunakan akun Covid-19

No	Jenis Persediaan	Persediaan Masuk (Rp)	Persediaan Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Barang Konsumsi	-	-	-
2.	Barang untuk Pemeliharaan	-	-	-
3.	Suku Cadang	-	-	-
4.	Barang lainnya untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
5.	Persediaan Lainnya	139.440.000,00	25.637.250,00	113.802.750,00
Jumlah		139.440.000,00	25.637.250,00	113.802.750,00

Tanah

Rp282.466.804.200,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp282.466.804.200,00 dan Rp272.460.683.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	:	272.460.683.000,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian	:	197.825.000,00
Hibah	:	3.022.292.200,00
Transfer Masuk	:	4.625.132.000,00
Koreksi Susulan	:	2.160.872.000,00
Mutasi Kurang:		
Penghapusan	:	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022	:	282.466.804.200,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	:	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	:	282.466.804.200,00

Tabel 11
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2022

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	270.849.552.000,00
2	2.01.01.04.001	730 m ²	1.808.956.000,00
3	2.01.01.04.001	332 m ²	2.313.992.200,00
4	2.01.01.04.001	2.361 m ²	708.300.000,00
5	2.01.01.04.001	46 m ²	3.415.915.000,00
6	2.01.01.04.001	56 m ²	3.370.089.000,00
Jumlah			282.466.804.200,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rincian letak Tanah Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.
2. Tanah seluas 730 m² terletak di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
3. Tanah seluas 332 m² terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Pontianak, Kalimantan Barat.
4. Tanah seluas 2.361 m² terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.
5. Tanah seluas 46 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
6. Tanah seluas 56 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pengembangan nilai aset Tanah Per 31 Desember 2022 senilai Rp197.825.000,00 berupa pengurukan tanah dan Pematangan Tanah di Jalan Komplek Perumahan Griya Pinang Asri, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang Kota Tangerang senilai Rp197.825.000,00 SPM Nomor:00528 tanggal 31 Desember 2022, Nomor SP2D 221331701004778 tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat koreksi nilai Tanah senilai 5.183.164.200,00 terdiri dari:

1. Koreksi Susulan Tanah senilai Rp2.160.872.000,00, Per 31 Desember 2022 berupa Penetapan status Penggunaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Komisi Yudisial transfer dari KPK senilai Rp4.625.132.000,00. Tanah

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

seluas 46 m² dan tanah seluas 56 m² di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Komisi Yudisial melakukan penyesuaian nilai, sesuai dengan nilai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 139/KM.6/2022 tentang Penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara pada Komisi Yudisial senilai Rp6.786.004.000,00.

2. Hibah Tanah yang diterima Komisi Yudisial per 31 Desember 2022 Rp3.022.292.200,00 berasal dari:
 - a. Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Jalan Sultan Syarif Abdurrachman, Pontianak, Kalimantan Barat, senilai Rp2.313.992.200,00 berupa tanah 332 m².
 - b. Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. senilai Rp708.300.000,00 berupa tanah 2.361 m².

Peralatan dan Mesin
Rp53.380.316.589,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp53.380.316.589,00 dan Rp50.442.519.447,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.743.181.801,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar (Rp45.637.134.788,00).

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	:	50.442.519.447,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian	:	7.646.380.771,00
Reklasifikasi Masuk	:	17.150.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	:	382.581.000,00
Perolehan Lainnya	:	29.215.200,00
Mutasi Kurang:		
Pembelian Ekstrakomptabel	:	88.251.752,00
Reklasifikasi Keluar	:	122.100.500,00
Koreksi Susulan	:	32.800.500,00
Penghentian Aset Dari Penggunaan	:	4.894.377.077,00
Saldo Per 31 Desember 2022	:	53.380.316.589,00
Akm. Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	:	(45.637.134.788,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	:	7.743.181.801,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Mutasi Tambah:

A. Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 senilai Rp7.646.380.771,00 sebagai berikut:

1. Pengadaan inventaris kantor Komisi Yudisial R.I. SPK Nomor: 279/SPK/PPK-1.KY/03/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00090/KYRI/2022 Tanggal 18 April 2022, SP2D Nomor: 221331301010620 sebesar Rp1.402.317.000,00.
2. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, SPK Nomor: 313/SPK/PPK-1.KY/03/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00113/KYRI/2022 Tanggal 22 April 2022, SP2D Nomor: 221331301011648 sebesar Rp824.256.000,00.
3. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kontrak Nomor: 512/SPK/PPK-1.KY/06/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00216/KYRI/2022 Tanggal 08 Juli 2022, SP2D Nomor: 221331301023811 Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp318.090.000,00.
4. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Sulawesi Utara, sesuai SPK No: 408/SPK/PPK-1.KY/04/2022, SPM Nomor: 00220/KYRI/2022 Tanggal 11 Juli 2022, SP2D Nomor: 221331701001436 Tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp70.000.000,00.
5. Pengadaan Inventaris penunjang Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022 Komisi Yudisial RI, sesuai dengan SPK Nomor: 522/SPK/PPK-1/06/2022 SPM Nomor: 00220/KYRI/2022 Tanggal 11 Juli 2022, SP2D Nomor: 221331701001436 Tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp153.300.000,00.
6. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kuitansi Nomor: 22/06/A004z sesuai dengan SPM Nomor: 00220/KYRI/2022 Tanggal 11 Juli 2022, SP2D Nomor: 221331701001436 Tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp38.850.000,00.
7. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kontrak Nomor: 523/PERJ/PPK-1.KY/06/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00235/KYRI/2022 Tanggal 18

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Juli 2022, SP2D Nomor: 221331301024926 Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp66.771.000,00.
8. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kontrak Nomor: 612/PERJ/PPK-1.KY/07/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00254/KYRI/2022 Tanggal 08 Agustus 2022, SP2D Nomor: 221331303009264 Tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp85.998.000,00.
 9. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan kuitansi Nomor:49/Kwt/MPJ/V/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00261/KYRI/2022 Tanggal 09 Agustus 2022, SP2D Nomor: 221331301028515 Tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp26.300.000,00.
 10. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan kuitansi Nomor:56/Fak/FUM/VI/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00261/KYRI/2022 Tanggal 09 Agustus 2022, SP2D Nomor: 221331301028515 Tanggal 09 Agustus 2022 sebesar Rp28.625.000,00.
 11. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Perjanjian Nomor: 623/Perj/PPK-1.KY/07/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00277/KYRI/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, SP2D Nomor: 221331301030849 Tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp108.299.000,00.
 12. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan kuitansi Nomor: 006.JP.VII.2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00313/KYRI/2022 Tanggal 19 September 2022, SP2D Nomor: 221331301034905 Tanggal 19 September 2022 sebesar Rp42.500.000,00.
 13. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kuitansi Nomor:062422, sesuai dengan SPM Nomor: 00313/KYRI/2022 Tanggal 19 September 2022, SP2D Nomor: 221331301034905 Tanggal 19 September 2022 sebesar Rp42.000.000,00.
 14. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Kontrak Nomor: 580/SPK/PPK-1.KY/07/2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00313/KYRI/2022 Tanggal 19

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- September 2022, SP2D Nomor: 221331301034905 Tanggal 19 September 2022 sebesar Rp49.230.000,00.
15. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Perjanjian Nomor: 713/Perj/PPK-1.KY/08/2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00321/KYRI/2022 Tanggal 22 September 2022, SP2D Nomor: 221331302013021 Tanggal 23 September 2022 sebesar Rp542.400.000,00.
16. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Perjanjian Nomor: 716/Perj/PPK-1.KY/08/2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00322/KYRI/2022 Tanggal 22 September 2022, SP2D Nomor: 221331302013022 Tanggal 23 September 2022 sebesar Rp436.500.000,00.
17. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan Perjanjian Nomor: 01/PERJ/PPK-5.KY/07/2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00320/KYRI/2022 Tanggal 13 September 2022, SP2D Nomor: 221331302013022 Tanggal 13 September 2022 sebesar Rp492.000.000,00.
18. Pengadaan barang Inventaris kantor Administrasi Penghubung Pusat Tahun Anggaran 2022, sesuai Kontrak Nomor: 643/SPK/PPK-1.KY/07/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00338/KYRI/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331301037431 Tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp29.976.000,00.
19. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Kalimantan Timur (Samarinda) sesuai Kontrak Nomor: 701/SPK/PPK-1.KY/08/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00338/KYRI/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331301037431 Tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp40.499.979,00.
20. Pengadaan Inventaris kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, sesuai kuitansi No: 56/Fak/FUM/VI/2022, sesuai dengan SPM Nomor: 00338/KYRI/2022 Tanggal 05 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331301037431 Tanggal 05 Oktober 2022 sebesar Rp9.000.000,00.
21. Pengadaan barang Inventaris kantor Sekretariat Jenderal

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Komisi Yudisial RI berupa Laptop dan Printer TA. 2022, sesuai SPK No: 556/SPK/PPK-1.KY/06/2022 SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp71.600.000,00.
22. Pengadaan barang Inventaris kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai Surat Perjanjian No.574/Perj/PPK-1.KY/07/2022 SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp171.093.180,00.
23. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Nusa Tenggara Timur, sesuai SPK No: 488/SPK/PPK-1.KY/05/2022, SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp65.000.000,00.
24. Pengadaan barang Inventaris kantor Pimpinan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 647/SPK/PPK-1.KY/07/2022, SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp79.395.000,00.
25. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Jawa Timur, sesuai SPK Nomor: 407/SPK/PPK-1.KY/04/2022, SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp50.500.000,00.
26. Pengadaan barang Inventaris kantor Penghubung Pusat Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai Surat Perjanjian No.: 643/Perj/PPK-1.KY/07/2022 SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp102.558.450,00.
27. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- dengan Kontrak Nomor: 557/SPK/PPK-1.KY/06/2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp187.500.000,00.
28. Pengadaan barang Inventaris kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai Surat Perjanjian No: 644/Perj/PPK-1.KY/07/2022 SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp138.084.000,00.
29. Pengadaan barang Inventaris kantor Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai Surat Perjanjian No: 642/Perj/PPK-1.KY/07/2022 SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp123.059.040,00.
30. pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Jawa Tengah (Semarang) sesuai SPK Nomor: 701/SPK/PPK-1.KY/08/2022, SPM Nomor: 00356/KYRI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022, SP2D Nomor: 221331701002475 Tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp54.000.000,00.
31. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2022 SPM Nomor: 00414/KYRI/2022 Tanggal 10 November 2022 SP2D Nomor: 221331301045367 Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp24.900.000,00
32. Pengadaan barang Inventaris kantor Pimpinan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 841/SPK/PPK-1.KY/10/2022, SPM Nomor: 00451/KYRI/2022 Tanggal 02 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701003214 Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp51.000.000,00.
33. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Maluku, sesuai SPK Nomor: 768/SPK/PPK-1.KY/09/2022 SPM Nomor: 00451/KYRI/2022 Tanggal 02

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701003214 Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp51.000.000,00.
34. Pengadaan Barang Inventaris Kantor untuk 8 Wilayah Baru Penghubung Tahun Anggaran 2022 Perjanjian Nomor: 946/PERJ/PPK-1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00458/KYRI/2022 Tanggal 02 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331301049851 Tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp460.568.000,00.
35. Pengadaan barang Inventaris Penunjang Pejabat Negara Kantor KYRI Tahun Anggaran 2022 sesuai Kuitansi SPM Nomor: 00481/KYRI/2022 Tanggal 7 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331301051525 Tanggal 08 Desember 2022 sebesar Rp5.850.000,00.
36. Pekerjaan Pembuatan Access Door dan Buku Tamu Digital Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1027/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp195.000.000,00.
37. Pengadaan barang Inventaris kantor Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1026/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.933.500,00.
38. Pengadaan barang Inventaris kantor Komisi Yudisial RI berupa Proyektor Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1064/SPK/PPK-1.KY/12/2022 SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp180.000.000,00.
39. Pengadaan barang Inventaris kantor Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1086/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.940.000,00.
40. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- RI wilayah Matarama Nusa Tenggara Barat, sesuai SPK Nomor: 489/SPK/PPK-1.KY/05/2022 SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp89.735.000,00.
41. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Makassar, sesuai SPK Nomor: 900/SPK/PPK1.KY/10/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp66.900.000,00.
42. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Lampung, sesuai SPK Nomor: 993/SPK/PPK1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.394.000,00.
43. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Banjarmasin, sesuai SPK Nomor: 992/SPK/PPK-1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.489.000,00.
44. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Bali, sesuai SPK Nomor: 989/SPK/PPK-1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.419.000,00.
45. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Aceh, sesuai SPK Nomor: 988/SPK/PPK-1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.469.000,00.
46. Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Sulawesi Tenggara (Kendari) Tahun Anggaran 2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Desember 2022, SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp94.225.000,00.

47. Pengadaan Inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial RI wilayah Padang, sesuai SPK Nomor: 994/SPK/PPK-1.KY/11/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.394.000,00.

48. Pengadaan barang Inventaris kantor Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1026/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.978.400,00.

49. Pengadaan barang Inventaris kantor Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor: 1086/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp103.534.222,00.

50. Pengadaan Inventaris Kantor Komisi Yudisial RI, sesuai dengan, sesuai dengan SPM Nomor: 00533/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor: 221331701004776 Tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.000.000,00.

B. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif Per 31 Desember 2022 senilai Rp382.581.000,00. Pencatatan pembatalan barang yang akan dihapuskan disebabkan oleh awal perencanaan akan dilakukan penghapusan sebanyak 11 unit alat angkutan darat bermotor, tetapi ada kekhawatiran terdapat kekosongan, maka sebanyak 2 unit tidak jadi dilakukan penghapusan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat koreksi nilai Peralatan dan Mesin penambahan senilai Rp46.365.200,00 dan pengurangan senilai Rp32.800.500,00 terdiri dari:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. Penambahan dari Perolehan Lainnya Rp29.215.200,00 yaitu:
 - a. Pembelian 8 unit strobo No Kuitansi: K.8580 dan K.8576 senilai Rp18.115.200,00.
 - b. Pembelian scanner dalam kontrak pembuatan access door senilai Rp11.100.000,00.
2. Penambahan dari Reklas Jaringan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp17.150.000,00.
3. Pengurangan dari Reklas Pintu Elektrik ke Gedung dan Bangunan senilai Rp32.800.500,00.

Rincian penambahan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 kedalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap sebesar Rp7.864,974.719,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bantu	7	57.838.860,00
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	2	382.581.000,00
3	Alat Ukur	19	49.900.000,00
4	Alat Pengolahan	10	30.257.000,00
5	Alat Kantor	70	515.743.910,00
6	Alat Rumah Tangga	196	874.116.650,00
7	Alat Studio	39	1.215.562.741,00
8	Alat Komunikasi	10	53.311.080,00
9	Unit Alat Laboratorium	6	13.127.970,00
10	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1	6.504.600,00
11	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1	1.534.000,00
12	Alat Khusus Kepolisian	13	167.679.610,00
13	Komputer Unit	247	3.261.624.531,00
14	Peralatan Komputer	102	965.249.620,00
15	Alat Kerja Penerbangan	47	269.943.147,00
Jumlah			7.864.974.719,00

Rincian Pengurangan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 kedalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap senilai Rp4.927.177.577,00, terdiri Penghentian Aset Dari Penggunaan Peralatan dan Mesin senilai Rp4.894.377.077,00 dan Koreksi Susulan Rp32.800.500,00 per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	19	2.727.561.000,00
2	Alat Kantor	8	76.969.886,00
3	Alat Rumah Tangga	55	251.412.290,00
4	Alat Studio	22	138.181.600,00
5	Alat Komunikasi	11	13.467.500,00
6	Alat Khusus Kepolisian	8	10.126.000,00
7	Komputer Unit	134	1.526.188.990,00
8	Peralatan Komputer	35	183.270.311,00
Jumlah			4.927.177.577,00

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Alat Bantu	12	11.814.840,00
2	Alat Kantor	6	5.465.000,00
3	Alat Rumah Tangga	131	70.172.712,00
4	Alat Komunikasi	1	799.200,00
Jumlah			88.251.752,00

Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud dan Jaringan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.100.500,00, rincian Reklas Keluar Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Lisensi	1	104.950.500,00
2	Jaringan	1	17.150.000,00
Jumlah			122.100.500,00

Gedung dan Bangunan
Rp99.251.188.984,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp99.251.188.984,00 dan Rp95.414.717.599,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.758.957.054,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp12.492.231.930,00).

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	95.414.717.599,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian	492.905.355,00
Hibah Masuk	950.000.000,00
Pengembangan Melalui KDP	2.169.645.730,00
Koreksi Susulan	223.920.300,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	99.251.188.984,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(12.492.231.930,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	86.758.957.054,00

Penambahan Gedung dan Bangunan berupa penambahan Pembelian Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 senilai Rp492.905.355,00 yaitu:

1. Pengawasan konstruksi renovasi dan perawatan Gedung Kantor Komisi Yudisial TA 2022 sesuai dengan kontrak Nomor: 674/PERJ/PPK-1.KY/08/2022 SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022, SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp98.100.000,00.
2. Penggantian interior ruang kerja rapat Ketua Komisi Yudisial RI TA 2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022, SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp197.310.825,00.
3. Pembuatan ruang Podcast Komisi Yudisial RI TA 2022 sesuai dengan SPM Nomor: 00528/KYRI/2022 Tanggal 31 Desember 2022, SP2D Nomor: 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp197.494.530,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat koreksi nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.343.566.030,00.

- a. Hibah Tanah yang diterima Komisi Yudisial per 31 Desember

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2022 berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur 600 m², senilai Rp950.000.000,00.

- b. Pengambangan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2022 senilai Rp2.169.645.730,00.
 1. Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 Rp216.234.730,00.
 2. Renovasi dan Perawatan Gedung Kantor Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 sesuai Perjanjian Nomor: 708/PERJ/PPK-1.KY/08/2022 senilai Rp1.953.411.000,00 sebagai berikut:
 - a). Pembayaran Tahap I SPM Nomor. 00367 Tanggal 17 Oktober 2022 SP2D Nomor 221331301039997 Tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp552.705.600,00.
 - b). Pembayaran Tahap II SPM Nomor. 00391 Tanggal 07 November 2022 SP2D Nomor 221331301043760 Tanggal 07 November 2022 sebesar Rp619.341.000,00.
 - c). Pembayaran Tahap III SPM Nomor. 00467 Tanggal 07 Desember 2022 SP2D Nomor 221331301043760 Tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp781.364.400,00.
- c. Koreksi Susulan Per 31 Desember 2022 senilai Rp223.920.300,00 yaitu:
 1. Koreksi susulan dari Peralatan dan Mesin berupa Pintu Elektrik senilai Rp 32.800.500,00 .
 2. Koreksi Susulan berupa pengadaan karpet senilai Rp191.119.800,00.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.588.869.628,00

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.588.869.628,00 dan Rp3.588.869.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.167.477,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp3.488.702.151,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	3.588.869.628,00
Mutasi Tambah:	

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Pembelian	17.150.000,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Keluar	17.150.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	3.588.869.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(3.488.702.151,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	100.167.477,00

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 senilai Rp17.150.000,00 dari penambahan Peralatan dan Mesin: pengadaan inventaris kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau berupa Instalasi Generating Set sesuai SPK Nomor:580/SPK/PPK-1.KY/07/2022 SPM Nomor.00313 Tanggal 16 September 2022 SP2D Nomor.221331701004778 Tanggal 19 September 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat koreksi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp17.150.000,00 yaitu Reklasifikasi Masuk ke Peralatan dan Mesin.

Aset Tetap Lainnya
Rp2.429.696.615,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.429.696.615,00 dan Rp2.466.563.964,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Netto Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.603.009.344,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp826.687.271,00).

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	2.466.563.964,00
Mutasi Tambah:	0,00
Perolehan Lainnya	311.351.805,00
Mutasi Kurang:	0,00
Usulan Penghapusan	348.219.154,00
Saldo per 31 Desember 2022	2.429.696.615,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(826.687.271,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	1.603.009.344,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat Aset Tetap Lainnya sebesar Rp311.351.805,00 berupa pengadaan kanopi, karpet dan taman dirumah jabatan pejabat negara.

Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 yaitu berupa:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Aset Tetap Renovasi	9	1.233.036.783,00
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.754	611.685.312,00
3	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	8	539.189.000,00
4	Kartografi. Naskah dan Lukisan	9	45.785.520,00
Jumlah			2.429.696.615,00

Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi di Komisi Yudisial RI adalah kapitalisasi Aset Tetap Renovasi Kantor Penghubung Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 dan 2022 yang belum diserahkan kepada pemilik kantor penghubung yang telah ditempati Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI berdasarkan Surat Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah dan rumah dinas Pejabat Negara milik Kementerian Sekretariat Negara.

Rincian Aset Tetap Renovasi sebagai berikut:

No	Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi	Nilai (Rp)
1	TA 2022 Kemensekneg di Jakarta	311.351.805,00
2	TA 2021 PKY di Nusa Tenggara Timur	145.750.000,00
3	TA 2021 PKY di Sumatera Selatan	94.997.707,00
4	TA 2019 PKY di Nusa Tenggara Barat	172.689.000,00
5	TA 2019 PKY di Jawa Tengah	117.079.000,00
6	TA 2018 PKY di Kalimantan Timur	106.067.500,00
7	TA 2018 PKY di Nusa Tenggara Barat	124.200.520,00
8	TA 2017 PKY di Nusa Tenggara Timur	58.122.448,00
9	TA 2016 PKY di Sumatera Utara	102.778.803,00
Jumlah		1.233.036.783,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(62.444.756.140,00)

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah (Rp62.444.756.140,00) dan (Rp62.069.176.547,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 12

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	282.466.804.200,00	0,00	282.466.804.200,00
2	Peralatan dan Mesin	53.380.316.589,00	(45.637.134.788,00)	7.743.181.801,00
3	Gedung dan Bangunan	99.251.188.984,00	(12.492.231.930,00)	86.758.957.054,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.588.869.628,00	(3.488.702.151,00)	100.167.477,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.429.696.615,00	(826.687.271,00)	1.603.009.344,00
	Jumlah	441.116.876.016,00	(62.444.756.140,00)	378.672.119.876,00

Aset Tak Berwujud
Rp2.165.701.060,00

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp2.165.701.060,00 dan Rp2.655.488.940,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	2.655.488.940,00
Mutasi Tambah:	0,00
Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin	104.950.500,00
Mutasi Kurang :	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	583.638.380,00
Koreksi Susulan	11.100.000,00
Saldo per 31 Desember 2022	2.165.701.060,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(2.019.824.635,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	145.876.425,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Penambahan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 senilai Rp104.950.500,00 berasal dari penambahan Peralatan dan Mesin berupa Buku Tamu Digital Tahun Anggaran 2022, sesuai SPK Nomor:1027/SPK/PPK-1.KY/12/2022, SPM Nomor.00528 Tanggal 31 Desember 2022 SP2D Nomor. 221331701004778 Tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp583.638.380,00 dan Koreksi Susulan senilai Rp11.100.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 yaitu berupa:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Software	215	1.948.233.800,00
2	Lisensi	54	123.616.760,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	93.850.500,00
Jumlah			2.165.701.060,00

Rincian Penghapusan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 yaitu berupa:

No	Uraian Barang	Unit	Rupiah
1	Software	32	403.105.220,00
2	Lisensi	96	180.533.160,00
Jumlah			583.638.380,00

Aset Lain-lain

Rp583.638.380,00

C.10 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp583.638.380,00 dan Rp1.200.705.558,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN (aset tetap dan aset tak berwujud yang sudah tidak digunakan dalam operasional Komisi Yudisial).

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2021	1.200.705.558,00
Mutasi Tambah:	0,00
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	583.638.380,00
Mutasi Kurang:	0,00
Usulan Penghapusan BMN	1.200.705.558,00
Saldo per 31 Desember 2022	583.638.380,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	(580.763.380,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	2.875.000,00

Usulan Penghapusan BMN per 31 Desember 2022 senilai Rp1.200.705.558,00. Usulan penghapusan BMN dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sesuai surat 903/SET/PK.02.01/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang persetujuan penjualan BMN selain tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Yudisial RI dan salinan Risalah Lelang Nomor: 113/26/2022 tanggal 23 Februari 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Rp583.638.380,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
(Rp2.600.588.015,00)

C.11 Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah (Rp2.600.588.015,00) dan (Rp3.579.717.204,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 13
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	1.948.233.800,00	(1.918.543.925,00)	29.689.875,00
2	Lisensi	123.616.760,00	(101.280.710,00)	22.336.050,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	93.850.500,00	0,00	93.850.500,00
4	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	583.638.380,00	(580.763.380,00)	2.875.000,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

	<i>Operasional Pemerintah</i>			
	<i>Jumlah</i>	<i>2.749.339.440,00</i>	<i>(2.600.588.015,00)</i>	<i>148.751.425,00</i>

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp271.727.085,00

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp271.727.085,00 dan Rp178.278.499,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Sampai tanggal 31 Desember 2022 masih ada kewajiban yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Rp62.109.250,00;
2. Belanja Langganan Listrik untuk Kantor Komisi Yudisial Bulan Desember 2022 sebesar Rp187.951.628,00;
3. Belanja Langganan Indihome untuk Kantor Komisi Yudisial Bulan Desember 2022 sebesar Rp10.184.659,00;
4. Belanja Langganan Telepon untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Riau, Lampung, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku, Jawa Timur, Bali Rp5.580.742,00;
5. Belanja Langganan Air untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur di Bulan Desember 2022 sebesar Rp2.056.778,00;
6. Belanja Langganan Listrik untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur, Bali, Nangroe Aceh Darussalam sebesar Rp1.985.224,00;
7. Belanja Langganan Listrik untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara sebesar Rp1.858.804,00.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2022 yang Dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited) Nomor: NKF-054/100/PB.6/2023 terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Rp62.109.250,00 dan Belanja Barang yang Masih Harus dibayar Rp2.715.423,00.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp21.120.332,00*

C.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp21.120.332,00 dan Rp106.300.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya. namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Di Terima Dimuka yaitu berupa Pendapatan diterima dimuka berupa Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan untuk Kantin Komisi Yudisial sebesar Rp21.120.332,00 sesuai Perjanjian Nomor: PERJ-01/BU.KY/09/2022 tanggal 26 September 2022. dengan periode sewa 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.680.500,00.

*Ekuitas
Rp382.212.647.545,00*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp382.212.647.545,00 dan Rp365.346.957.757,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan PNB

Rp122.140.668,,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp122.140.668,00 dan Rp110.098.167,00. terjadi kenaikan sebesar Rp12.042.501,00 atau sebesar 10,94 persen Pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebagai berikut:

- a) Sewa Kantor BRI dan ATM periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp85.852.500,00, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.02/BU.KY/11/2020 periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp171.705.000,00.
- b) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 Januari 2022 s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp20.448.000,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/08/2021 periode 1 September 2021 s.d. 31 Agustus 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp30.672.000,00.
- c) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial periode 01 September 2022 s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp10.560.168,00 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan atas Biaya sewa sebagian halaman counter/kios kantin seluas 69,3 m² di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Nomor: PERJ.01/BU.KY/08/2022 periode 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp31.680.500,00.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- d) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp5.280.000,00 berupa Pembayaran Belanja Modal Tahap-3 sesuai Kontrak No.708/PERJ/PPK-1.KY/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, Addendum Kontrak No.006/Addendum.Perj/PPK-1.KY/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022, BAPP No.1289/BAPP/PPK-1.KY/11/2022 Tanggal 24 November 2022 SP2D 221331301051112 tanggal 07 Desember 2022.

Beban Pegawai

Rp36.348.917.020,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp36.348.917.020,00 dan Rp35.089.813.637,00. Saldo beban pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.259.103.383,00 atau sebesar 3,59 persen dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 14
Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

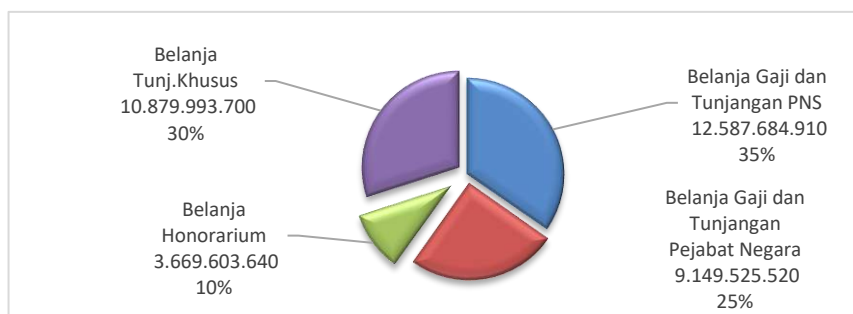
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.649.794.160,00	12.695.557.407,00	(0,36)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	9.149.525.520,00	9.105.866.760,00	0,48
Belanja Honorarium	3.669.603.640,00	3.413.040.600,00	7,52
Belanja Tunj.Khusus	10.879.993.700,00	9.875.348.870,00	10,17
Jumlah	36.348.917.020,00	35.089.813.637,00	3,59

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 8

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022



Beban Persediaan
Rp1.725.042.288,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.725.042.288,00 dan Rp1.446.372.949,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp278.669.339,00 atau sebesar 19,27 persen dari tahun sebelumnya. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	991.647.793,00	906.229.881,00	9,43
Beban Persediaan Bahan Baku	131.519.350,00	139.010.100,00	(5,39)
Beban Persediaan Lainnya	601.875.145,00	401.132.968,00	50,04
Jumlah Beban Persediaan	1.725.042.288,00	1.446.372.949,00	19,27

Grafik 9

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Beban Barang dan Jasa
Rp58.063.593.261,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp58.063.593.261,00 dan Rp35.011.908.612,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp23.051.684.649,00 atau sebesar 65,84 persen dari tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

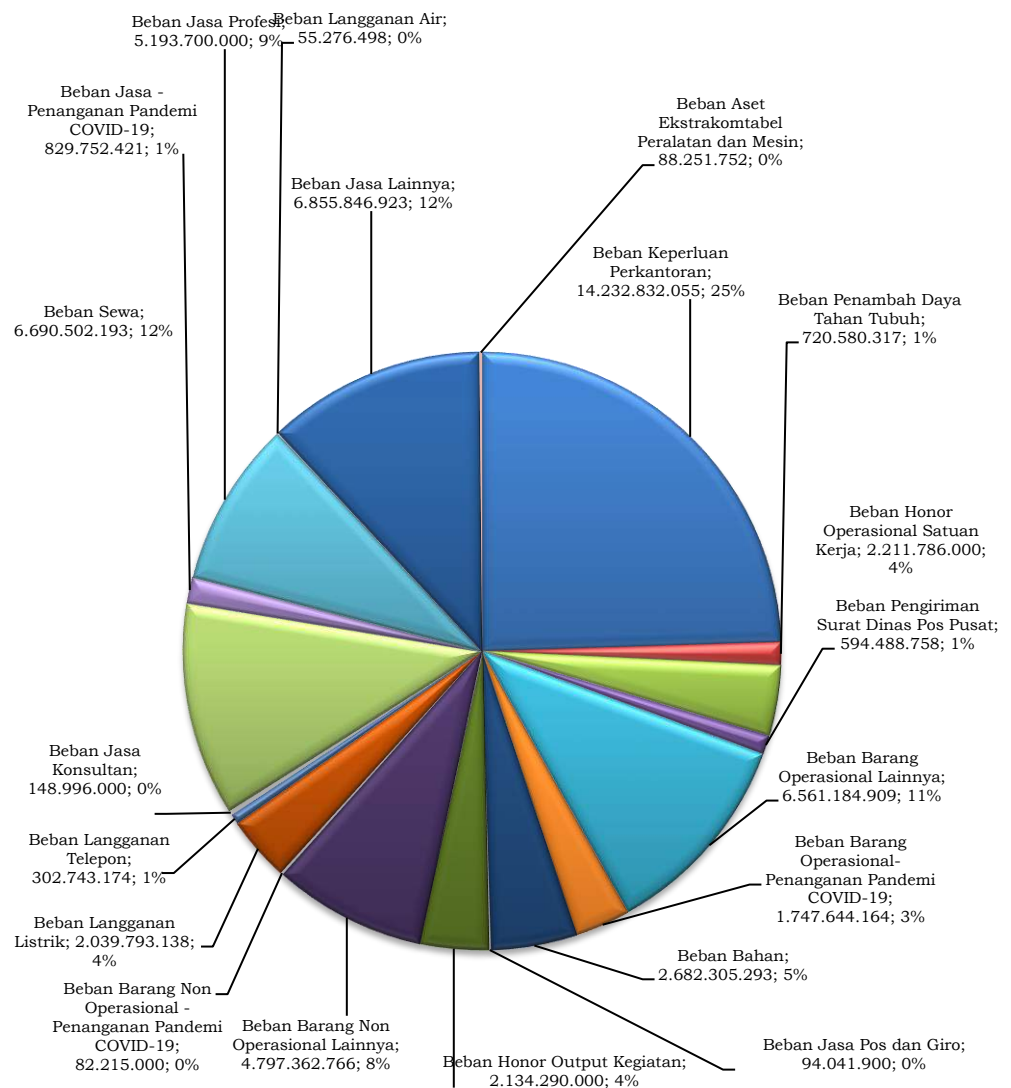
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	14.232.832.055,00	11.145.131.317,00	27,70
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	720.580.317,00	143.812.500,00	401,06
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	594.488.758,00	370.979.639,00	60,25
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.211.786.000,00	2.058.169.600,00	7,46
Beban Barang Operasional Lainnya	6.561.184.909,00	4.066.386.459,00	61,35
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	1.747.644.164,00	1.658.273.501,00	5,39
Beban Bahan	2.682.305.293,00	1.221.529.263,00	119,59
Beban Honor Output Kegiatan	2.134.290.000,00	2.106.530.000,00	1,32
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.797.362.766,00	1.485.060.682,00	223,04
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	82.215.000,00	106.763.376,00	(22,99)
Beban Langganan Listrik	2.039.793.138,00	1.669.025.422,00	22,21
Beban Langganan Telepon	302.743.174,00	304.025.731,00	(0,42)
Beban Langganan Air	55.276.498,00	60.116.326,00	(8,05)
Beban Jasa Pos dan Giro	94.041.900,00	66.265.960,00	41,92
Beban Jasa Konsultan	148.996.000,00	146.270.000,00	1,86

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Beban Sewa	6.690.502.193,00	4.168.514.078,00	60,50
Beban Jasa Profesi	5.193.700.000,00	2.491.170.000,00	108,48
Beban Jasa Lainnya	6.855.846.923,00	445.050.000,00	1.440,47
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	829.752.421,00	1.298.834.758,00	(36,12)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	88.251.752,00	0,00	~
Jumlah	58.063.593.261,00	35.011.908.612,00	65,84

Grafik 10
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022



Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Beban Pemeliharaan
Rp8.335.378.617,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.335.378.617,00 dan Rp8.407.707.649,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp72.329.032,000 atau sebesar (0,86) dari tahun sebelumnya. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

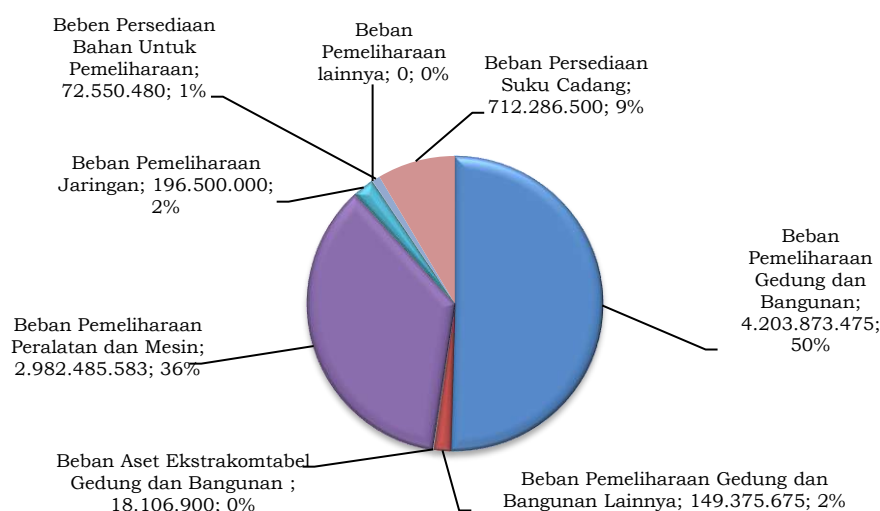
Tabel 17
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.203.873.475,00	5.232.567.607,00	(19,66)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	149.375.675,00	304.270.706,00	(50,91)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.982.485.583,00	2.093.063.102,00	42,49
Beban Pemeliharaan Jaringan	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan lainnya	0,00	49.916.900,00	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	72.550.480,00	495.462.250,00	(85,36)
Beban Persediaan Suku Cadang	712.486.500,00	35.927.084,00	1.882,59
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	18.106.900,00	-	~
Jumlah	8.335.378.617,00	8.407.707.649,00	(0,86)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 11
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022



Beban Perjalanan Dinas
Rp44.515.612.580,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp44.515.612.580,00 dan Rp20.413.372.974,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp24.102.239.606 atau sebesar 118,07 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan Perjalanan Dinas disebabkan karena tahun lalu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak berjalan maksimal akibat pandemi Virus Covid-19. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 2021

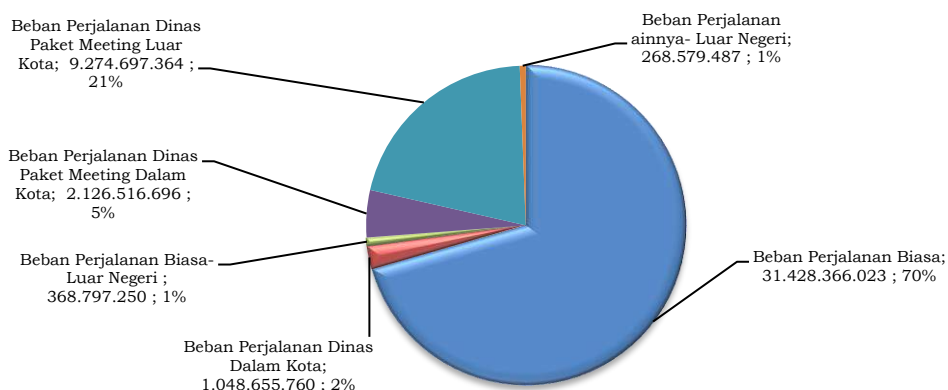
Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	31.428.366.023,00	17.770.065.494,00	76,86
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.048.655.760,00	525.471.000,00	99,56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.126.516.696,00	70.105.000,00	2.933,33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.274.697.364,00	2.047.731.480,00	352,93
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	368.797.250,00	0,00	-
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	268.579.487,00	0,00	-
Jumlah	44.515.612.580,00	20.413.372.974,00	118,07

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 12

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022



Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat
Rp1.744.312.200,00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.744.312.200,00 dan Rp776.620.000,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp969.302.200,00 atau sebesar 124,60 persen dari tahun sebelumnya. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat	1.744.012.200,00	775.710.000,00	125,83
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	300.000,00	910.000,00	(67,03)
Jumlah	1.744.312.200,00	776.620.000,00	124,60

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.072.162.087,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.072.162.087,00 dan Rp5.216.135.389,00. Saldo tersebut turun sebesar Rp143.973.302,00 atau sebesar 2,76 persen dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

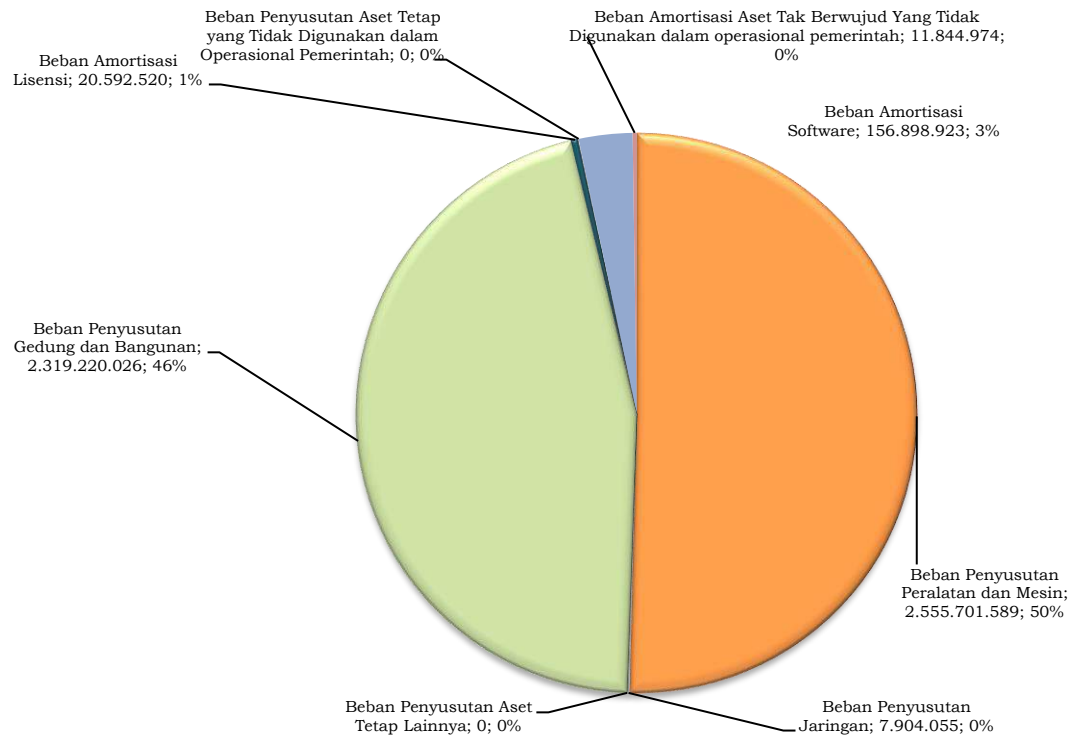
Tabel 20
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.555.701.589,00	1.678.512.768,00	52,26
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.319.220.026,00	2.272.445.486,00	2,06
Beban Penyusutan Jaringan	7.904.055,00	7.904.055,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	826.687.271,00	(100,00)
Beban Amortisasi Software	156.898.923,00	380.878.125,00	(58,81)
Beban Amortisasi Lisensi	20.592.520,00	30.415.063,00	(32,29)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan dalam operasional pemerintah	11.844.974,00	17.939.953,00	(33,97)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.352.668,00	(100,00)
Jumlah	5.072.162.087,00	5.216.135.389,00	(2,76)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Grafik 13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022



Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Rp304.826.806,00

D.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp304.826.806,00 dan Rp0,00. Pendapatan PNBPN di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan faktor usia barang.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Rp385.009.106,00

D.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp385.009.106,00 dan Rp1.761.000.00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya aset tetap.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp74.504.339,00

D.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp74.504.339,00 dan Rp98.066.421,00 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp29.067.248,00
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp45.437.091,00

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp2.983.014,00*

D.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.983.014,00 dan Rp15.239.000,00. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 yaitu berupa Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp2.983.014,00.

*Surplus/ (Defisit) - LO
(Rp155.691.538.360,00)*

D.13. Surplus / (Defisit) - LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp155.691.538.360,00) dan (Rp106.170.766.622,00)

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antar asset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal

Rp365.346.957.757,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp365.346.957.757,00 dan Rp367.941.547.845,00.

Defisit LO

(Rp155.691.538.360,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp155.691.538.360,00) dan (Rp106.170.766.622,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas

Rp172.559.178.148,00

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp172.559.178.148,00 dan Rp103.474.567.864,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp162.199.066.693,00
2. Diterima dari Entitas Lain sebesar (Rp416.291.645,00)
3. Transfer Masuk Rp6.786.004.000,00

Ekuitas Akhir

Rp382.212.647.545,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp382.212.647.545,00 dan Rp365.346.957.757,00

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, maka belanja penanganan COVID-19 pada Kantor Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Belanja Penanganan Pandemi Covid-19
per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	1.865.725.000	1.747.644.164,00	93,67
Belanja Barang Non Operasional –Penanganan Pandemi COVID-19	87.300.000,00	82.215.000,00	94,18
Belanja Barang persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	162.000.000,00	139.440.000,00	86,07
Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	959.355.000,00	829.752,421,00	86,49
Total Belanja Kotor	3.074.380.000,00	2.799.051.585,00	91,04
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	~
Jumlah	3.074.380.000,00	2.799.051.585,00	91,04

Komisi Yudisial RI menerima manfaat dari *The Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* yang merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan Kawasan. Tahun 2022 Komisi Yudisial menerima manfaat berupa penyediaan tenaga ahli (konsultan) untuk membantu pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, seperti pengkajian terhadap kondisi terkini, pengkajian dan penyusunan berbagai peraturan serta SOP, pelatihan mediasi bersertifikasi, pelatihan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

komunikasi strategis, dan pelatihan *Targeted Selection Interview (TSI)* bersertifikasi.

Transfer Masuk merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lainnya. Komisi Yudisial RI mendapat Transfer Masuk dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berupa 2 (dua) bidang tanah dan Rumah Kantor di Surabaya Jawa Timur. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara pada Komisi Yudisial sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.139/KM.6/2022 tanggal 12 September 2022.

Adapun Nilai Barang Milik Negara tersebut sesuai dengan KMK Nomor139/KM.6/2022 senilai Rp6.786.004.000,00 Tanah dan Bangunan seluas 46 m²/184 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-11 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Tanah seluas 56 m²/224 m² terletak di Rumah Kantor Rich Palace Nomor H-12 Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Saat ini Komisi Yudisial sudah melakukan Permintaan Pemisahan Nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan Nomor 139/UM/PK.05/03/2023 tanggal 17 Maret 2023, dan sudah mendapat balasan dari KPKNL Surabaya No.S-2149/KNL.1001/2023 tentang Tindak Lanjut Permintaan Pemisahan Nilai Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan oleh Komisi Yudisial, dalam isi surat tersebut KPKNL Surabaya merujuk pada Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penilaian BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan oleh Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan berdasarkan kedudukan Kuasa Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Kemudian Komisi Yudisial meminta bantuan melalui kepada KPKNL Jakarta II melalui Surat Nomor: 119/SET/PK.05/04/2023 tanggal 06 April

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2023 dan telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Jakarta II melalui surat No.S-1371/KNL.0702/2023 Tanggal 12 April 2023 tentang Pemberitahuan Penilaian Barang Milik Negara Eks Rampasan KPK pada Komisi Yudisial RI bahwa Lokasi Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dilakukan penilaian berada di wilayah kerja KPKNL Surabaya, maka survei lapangan dan proses penilaian atas BMN akan dilaksanakan oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya. Bahwa terkait hal tersebut diatas, Tim KPKNL Surabaya sedang melakukan penilaian atas kedua obyek hibah tersebut.

Pada Tahun 2022 Komisi Yudisial Mendapat Hibah Tanah, Gedung dan Bangunan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1024/BKAD/2022 dan Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Yudisial RI Nomor: 19/BAST-BKAD-F/2022, Nomor:02/BA/SET/PK.02.01/09/2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Tanah dan Bangunan Di Jalan Sultan Syarif Abdurachman Pontianak Kepada Komisi Yudisial RI, Tanah Bangunan Gudang dengan luas 322 m² senilai Rp2.313.992.200,00 serta Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan luas 65 m² senilai Rp18.106.900,00.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:266/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan 1 (Satu) Unit Gedung Kepada Komisi Yudisial RI. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah dan 1 (Satu) Unit Gedung/ Bangunan yang terletak di Jalan M.H. Thamrin No.4 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan Nomor: BU.030/43/BPAD/2022 dan Nomor 01/PB/PK.01.02/09/2022 tanggal 1 September 2022 Tanah dengan luas 2.361 m² senilai Rp708.300.000,00 serta Gedung/ Bangunan dengan luas 600 m² senilai Rp950.000.000,00.

Komisi Yudisial RI mendapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII yang memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Kegiatan yang

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mendukung prioritas nasional (PN) VII adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Hakim dan Klinik Etik
2. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan;
3. Pengembangan Integritas Hakim;
4. Penguatan Data Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Jakarta, 09 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



Arie Sudihar